



## RESPONSIVITAS BPBD DALAM PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN CIANJUR PADA TAHUN 2022

**Muhammad Akbar Maulana<sup>1)</sup>**

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat, sehingga menuntut responsivitas pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas BPBD Kabupaten Cianjur dalam penanganan pascabencana gempa bumi tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, relawan tangguh bencana, aparatur desa, dan masyarakat terdampak. Analisis data mengacu pada konsep responsivitas publik menurut Dwiyanto, yang meliputi kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda dan prioritas pelayanan, pengembangan program pelayanan yang sesuai, penanganan aspirasi dan keluhan, serta komunikasi dua arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas BPBD Kabupaten Cianjur dalam penanganan pascabencana gempa bumi telah berjalan cukup baik, khususnya pada fase tanggap darurat, namun masih bersifat reaktif, belum merata, dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Keterbatasan tersebut terutama terlihat pada aspek kesiapsiagaan pra-bencana, penyesuaian program terhadap keragaman kebutuhan masyarakat, serta kecepatan dan konsistensi tindak lanjut pada tahap pemulihan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan responsivitas BPBD melalui pendekatan yang lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah.

**Kata kunci:** responsivitas, BPBD, pascabencana, gempa bumi, Kabupaten Cianjur

### **Abstract**

*The earthquake that occurred in Cianjur Regency in 2022 had a major impact on the social, economic, and infrastructure of the community, requiring a responsive response from the local government through the Regional Disaster Management Agency (BPBD). This study aims to analyze the responsiveness of the Cianjur Regency BPBD in handling the aftermath of the 2022 earthquake. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation, with informants consisting of the Head of the Cianjur Regency BPBD, Rehabilitation and Reconstruction Staff, disaster-resilient volunteers, village officials, and affected communities. Data analysis refers to the*

*concept of public responsiveness according to Dwiyanto, which includes the ability to recognize community needs, set service agendas and priorities, develop appropriate service programs, handle aspirations and complaints, and engage in two-way communication. The results of the study show that the responsiveness of the Cianjur District Disaster Management Agency (BPBD) in handling the aftermath of the earthquake has been quite good, especially in the emergency response phase, but it is still reactive, uneven, and not yet fully sustainable. These limitations are particularly evident in the areas of pre-disaster preparedness, program adaptation to the diverse needs of the community, and the speed and consistency of follow-up actions during the recovery phase. These findings underscore the importance of strengthening the responsiveness of the BPBD through a more proactive, inclusive, and sustainable approach to disaster management at the local level.*

**Keywords:** *responsiveness, BPBD, post-disaster, earthquake, Cianjur Regency*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berada pada kawasan *Pacific Ring of Fire* sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, khususnya gempa bumi. Kondisi geografis ini menuntut kesiapan dan kapasitas pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara efektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan dalam penanganan bencana, terutama pada fase pascabencana yang meliputi tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup kemampuan institusi publik dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, kualitas penanganan pascabencana sangat ditentukan oleh tingkat responsivitas lembaga pelaksana, khususnya BPBD.

Responsivitas dalam konteks pelayanan publik dipahami sebagai kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, serta mengembangkan program yang sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat (Dwiyanto, 2017). Denhardt dan Denhardt (2003) menegaskan bahwa responsivitas tidak hanya berkaitan

dengan kecepatan tindakan, tetapi juga dengan kemampuan lembaga publik menyesuaikan kebijakan dan pelayanan dengan situasi sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam penanggulangan bencana, responsivitas menjadi indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena menyangkut penyelamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 dengan magnitudo 5,6 telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa, puluhan ribu bangunan rusak, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Selain kerusakan fisik, gempa ini juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan BPBD Kabupaten Cianjur pada situasi krisis yang menuntut respons cepat, koordinasi lintas sektor, serta distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Namun, berbagai laporan dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa penanganan pascabencana gempa Cianjur belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan keterlambatan distribusi bantuan, keterbatasan logistik dan sumber daya manusia, akses wilayah terdampak yang sulit dijangkau, serta koordinasi antarinstansi yang belum maksimal. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat terdampak dan penanganan keluhan publik dinilai belum sepenuhnya responsif, sehingga memunculkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BPBD di berbagai daerah umumnya cukup responsif pada tahap awal tanggap darurat, seperti evakuasi dan penyediaan logistik, namun masih menghadapi kendala pada aspek ketepatan distribusi bantuan, koordinasi, dan keberlanjutan pemulihan pascabencana. Meski demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji responsivitas BPBD dalam penanganan pascabencana gempa bumi dengan menggunakan indikator responsivitas publik menurut Dwiyanto (2017), khususnya pada konteks gempa Cianjur tahun 2022, masih relatif

terbatas. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* baik dari sisi lokus, jenis bencana, maupun fokus analisis pada fase pascabencana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana responsivitas BPBD Kabupaten Cianjur dalam penanganan pascabencana gempa bumi tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian responsivitas lembaga publik dalam tata kelola bencana, serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas penanganan bencana di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur dalam penanganan pascabencana gempa bumi tahun 2022. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik respons lembaga publik terhadap kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara kontekstual tanpa pengujian hipotesis. Subjek penelitian meliputi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, KABID Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Relawan Tangguh Bencana, Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat terdampak. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan langsung dalam proses penanganan bencana.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Dwiyanto, yaitu Kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan publik, menanggapi aspirasi dan perubahan kebutuhan, serta membangun komunikasi dua arah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan ini menganalisis responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur dalam penanganan pascabencana gempa bumi dengan mengacu pada indikator responsivitas publik menurut Dwiyanto. Setiap indikator digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik penanganan pascabencana di lapangan dengan prinsip responsivitas dalam pelayanan publik.

### **1. Kemampuan Mengenali Kebutuhan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Cianjur memiliki kemampuan yang relatif baik dalam mengenali kebutuhan masyarakat terdampak pada fase pascabencana gempa bumi, khususnya pada tahap tanggap darurat. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa BPBD melakukan asesmen kebutuhan melalui pendataan korban dan kerusakan dengan melibatkan pemerintah desa dan relawan tangguh bencana. Pola koordinasi ini memungkinkan BPBD memperoleh informasi awal mengenai kebutuhan mendesak masyarakat, seperti logistik, hunian sementara, dan layanan darurat lainnya. Secara konseptual, praktik tersebut sejalan dengan indikator responsivitas publik yang menekankan pentingnya kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat secara cepat dan kontekstual.

Hasil wawancara juga menindikasikan bahwa kemampuan BPBD dalam mengenali kebutuhan masyarakat masih cenderung bersifat reaktif dan lebih terfokus pada fase pascabencana. Dari perspektif masyarakat, pengenalan kebutuhan lebih banyak dilakukan setelah bencana terjadi, sementara pada tahap pra-bencana masih terdapat keterbatasan dalam sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kebencanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun BPBD cukup responsif dalam mengidentifikasi kebutuhan darurat pascabencana, pengenalan kebutuhan masyarakat dalam konteks kesiapsiagaan dan pencegahan masih perlu diperkuat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian parsial antara praktik di lapangan dan konsep responsivitas, yang masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih proaktif dan berkelanjutan.

## **2. Menyusun Agenda dan Prioritas Pelayanan**

Pada indikator penyusunan agenda dan prioritas pelayanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Cianjur telah berupaya menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak bencana. Penentuan prioritas dilakukan dengan mendahulukan wilayah dengan kerusakan berat serta kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan, anak-anak, balita, dan lansia. Temuan ini menunjukkan bahwa agenda dan prioritas pelayanan yang disusun BPBD pada prinsipnya telah berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sebagaimana ditekankan dalam konsep responsivitas publik.

Dari perspektif masyarakat, pelaksanaan prioritas pelayanan belum sepenuhnya dirasakan merata, terutama pada bantuan lanjutan. Beberapa kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan perbaikan rumah dan bantuan lanjutan, dirasakan datang lebih lambat, khususnya bagi warga dengan tingkat kerusakan ringan atau yang tidak terdata pada tahap awal. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah terdampak memengaruhi konsistensi implementasi prioritas pelayanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa agenda dan prioritas pelayanan telah disusun sesuai dengan prinsip responsivitas, namun implementasinya masih menghadapi keterbatasan di lapangan.

## **3. Kemampuan Mengembangkan Program Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Cianjur telah mengembangkan berbagai program pelayanan pascabencana yang mencakup penyaluran bantuan logistik, penyediaan hunian sementara, layanan kesehatan dan psikososial, serta fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Program-program tersebut dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, serta melibatkan pemerintah desa dan relawan dalam proses pendataan dan pelaksanaan. Secara konseptual, temuan ini menunjukkan adanya upaya BPBD untuk mengembangkan program yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.

Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya mencerminkan keragaman kebutuhan masyarakat

terdampak. Beberapa program dinilai masih bersifat seragam, sementara kondisi dan kebutuhan setiap keluarga terdampak berbeda. Selain itu, program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dirasakan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Situasi ini menegaskan bahwa meskipun BPBD telah mengembangkan program pelayanan yang relevan, tingkat responsivitas program masih perlu ditingkatkan melalui penyesuaian yang lebih spesifik terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

#### **4. Kemampuan Menanggapi Aspirasi, Keluhan, dan Perubahan Kebutuhan Masyarakat**

Pada indikator kemampuan menanggapi aspirasi dan keluhan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Cianjur telah menyediakan berbagai saluran komunikasi untuk menerima laporan dan masukan dari masyarakat, baik melalui pemerintah desa, relawan, maupun posko penanganan bencana. Setiap aspirasi dan keluhan pada umumnya ditindaklanjuti berdasarkan tingkat urgensinya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya upaya sistematis BPBD dalam merespons aspirasi masyarakat pascabencana.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kecepatan dan efektivitas respons masih bervariasi, terutama pada tahap pemulihan lanjutan. Dari perspektif masyarakat, beberapa keluhan memerlukan waktu cukup lama untuk ditindaklanjuti, terutama pada tahap pemulihan lanjutan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BPBD telah menunjukkan responsivitas pada fase darurat, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan masyarakat pada tahap jangka menengah dan panjang masih menghadapi kendala. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa responsivitas BPBD telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam kecepatan dan konsistensi tindak lanjut.

#### **5. Kemampuan Membangun Komunikasi Dua Arah dengan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Cianjur telah membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah desa, relawan, posko penanganan bencana, serta

kegiatan sosialisasi. Mekanisme ini memungkinkan BPBD menyampaikan informasi terkait penanganan dan pemulihan pascabencana sekaligus menerima masukan dari masyarakat. Dari sudut pandang pemerintah desa dan relawan, komunikasi dengan BPBD dinilai cukup terbuka dan responsif, terutama dalam penyampaian informasi kondisi lapangan.

Dari sudut pandang masyarakat, komunikasi dua arah tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga secara langsung dan masih banyak bergantung pada peran pemerintah desa sebagai perantara. Akibatnya, tidak semua masyarakat memperoleh informasi secara merata atau memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dua arah telah terbangun, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan merata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur dalam penanganan pascabencana gempa bumi tahun 2022 telah menunjukkan upaya yang cukup baik, khususnya pada fase tanggap darurat dan awal pemulihan. BPBD mampu mengenali kebutuhan dasar masyarakat terdampak, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pemulihan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan relawan. Selain itu, BPBD juga membuka ruang bagi penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat serta membangun komunikasi dua arah selama proses penanganan pascabencana. Meskipun demikian, responsivitas tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih bersifat reaktif, belum merata, serta belum berkelanjutan, terutama dalam aspek kesiapsiagaan pra-bencana, penyesuaian program terhadap keragaman kebutuhan masyarakat, serta kecepatan dan konsistensi tindak lanjut pada tahap pemulihan jangka menengah dan panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan responsivitas BPBD masih diperlukan melalui peningkatan pendekatan yang lebih proaktif, inklusif, dan berkelanjutan agar penanganan pascabencana dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). *Buku penanganan gempa Cianjur 2022*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  
Peraturan Daerah Nomor 128 Tahun 2022 Pasal 3  
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008

### **Jurnal**

- Beong, S., Resmawan, E., & Kalinggi, R. (2018). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda*. Ilmu Pemerintahan, Samarinda.
- Moenir. (2010). *Gempa bencana di Kabupaten Cianjur*.
- Muhammad, A., & Hardianto. (2024). *Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana tanggap darurat angin kencang di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur*.
- Rochmah, S. (2013). *Responsivitas pelayanan: Studi pada kebijakan pelayanan air bersih*. Malang: UB Press.